

Urgensi Pembentukan Sekolah Rakyat Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Di Indonesia

Teofilus Ardian Hopeman^{1*}, I Gede Margunayasa², Ida Bagus Putu Arnyana³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*Corresponding author: teofilus@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Sekolah Rakyat pada masa kolonial dikenal sebagai *volksschool*. Pembentukan sekolah ini awalnya bertujuan untuk melatih keterampilan dasar masyarakat Indonesia serta membentuk masyarakat yang memiliki wawasan pendidikan, meskipun tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh kepentingan kolonial. Namun, dalam era reformasi, pemerintah kembali mencanangkan pendirian Sekolah Rakyat dengan konsep yang lebih inklusif dan modern, yang berfokus pada pemerataan pendidikan serta pengentasan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah dalam membentuk kembali Sekolah Rakyat serta menganalisis apakah konsep ini dapat menjawab kebutuhan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan sampel dipilih secara purposive dari lima daerah percontohan: Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), Kabupaten Dompu (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Sorong (Papua Barat Daya), dan Kabupaten Ogan Ilir (Sumatra Selatan). Jumlah total sampel sebanyak 25 orang, terdiri atas 5 pejabat Dinas Pendidikan, 5 kepala sekolah, 10 guru, dan 5 tokoh masyarakat lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi atas kesenjangan pendidikan di Indonesia, tetapi implementasinya perlu dukungan lintas sektor agar berkelanjutan.

Kata kunci: sekolah rakyat, pendidikan dasar, pendidikan menengah, *volksschool*

Abstract

People's Schools during the colonial era were known as volksschools. The establishment of these schools was initially aimed at training the basic skills of the Indonesian people and forming a society that had educational insight, although still within the limits set by colonial interests. However, in the reform era, the government re-initiated the establishment of People's Schools with a more inclusive and modern concept, which focused on equalizing education and alleviating poverty. The purpose of this study was to determine the extent to which the government was ready to re-establish People's Schools and to analyze whether this concept could answer the educational needs in various regions in Indonesia. This study used a qualitative-descriptive approach with a case study model. The population in this study were policymakers in the field of primary and secondary education, while the sample was selected purposively from five pilot areas: Bone Regency (South Sulawesi), Banyumas Regency (Central Java), Dompu Regency (West Nusa Tenggara), Sorong Regency (Southwest Papua), and Ogan Ilir Regency (South Sumatra). The total number of samples was 25 people, consisting of 5 Education Office officials, 5 school principals, 10 teachers, and 5 local community leaders. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies, with data analysis using the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that the government has prepared a fairly strong policy framework, but still faces challenges in terms of infrastructure, human resources, and community participation. In conclusion, Sekolah Rakyat has the potential to be a solution to the education gap in Indonesia, but its implementation requires cross-sector support to be sustainable.

Keywords: public school, primary education, secondary education, *volksschool*

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dalam peradaban suatu bangsa adalah pendidikan. Hal ini karena pendidikan memegang peran penting dalam membentuk kepribadian masyarakat, pola pikir, karakter, dan kehidupan sosial masyarakat (Mayrinda et al., 2024; Santika et al., 2019).

Seyogianya, tanpa pemerataan dalam akses pendidikan akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Fakta yang ditemukan di Indonesia saat ini yaitu masih terjadinya kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, antara wilayah yang maju secara teknologi dengan wilayah yang mengalami kesulitan untuk menikmati akses teknologi. Seluruh permasalahan tersebut telah berlangsung sejak masa penjajahan hingga sekarang. Akibat ketidak merataan infrastruktur tersebut maka terdapat kesenjangan kualitas SDM, mobilisasi sosial di beberapa wilayah di Indonesia. dan daya saing masyarakat di tingkat dunia.

Melihat dari perkembangannya, Sekolah Rakyat Sudah lama muncul di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, sekolah rakyat dikenal dengan nama *Volkschool*. Pendirian *Volkschool* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah saat itu akan Pendidikan untuk bangsa pribumi. Fokus pada *Volkschool* yaitu belajar membaca, menulis, dan berhitung. *Volkschool* sendiri diajar oleh tenaga pengajar Belanda dan menggunakan Bahasa pengantar yaitu Bahasa Belanda (Suherman & Bastaman, 2019). Pangsa pasar hadirnya *Volkschool* berasal dari kaum pribumi dengan status sosial ekonomi menengah kebawah. Setelah peristiwa kemerdekaan, semangat pemerataan Pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah. Beberapa langkah pemerataan Pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa langkah berikut (Al Mahmudi & Bungsu, 2023; Fathiya Dwi Utami et al., 2024; Kurnia & Hudaidah, 2021; Safei & Hudaidah, 2020; Yuliyanti et al., 2022):

Tabel 1. Perkembangan Pemerataan Pendidikan dari Masa Ke Masa

	Masa Kolonial	Masa Kemerdekaan	Masa Orde Lama	Masa Orde Baru	Masa Orde Reformasi
Tujuan Pendidikan	Meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung	Pemerataan Pendidikan bagi seluruh rakyat	pengembangan aspek moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan praktis, dan aspek jasmani.	meningkatkan aspek mental, moral, budi pekerti, dan keberagamaan	memberikan waktu lebih bagi guru untuk fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi
Kelompok umur	Masyarakat menengah ke bawah	Seluruh rakyat Indonesia	7-15 Tahun	7-15 Tahun	7-15 Tahun (pembahasan wajib belajar 12 tahun masih dikaji)
Program yang dicanangkan	membaca, menulis, dan berhitung	Pembangunan sekolah di daerah, pemberian beasiswa, dan peningkatan literasi	Penyelenggaraan ujian secara terpusat	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, rotasi guru dari kota ke desa, dan berfokus pada MBO	Pelaksanaan Pendidikan bersifat desentralisasi
Fasilitas yang dibangun	-	Pembangunan sekolah-sekolah di daerah	Memulihkan Lembaga Pendidikan keagamaan	Memperluas akses Pendidikan di daerah-daerah terpencil	Memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak

Data yang dihimpun dari BPS (Fadil et al., 2023; Marwan et al., 2024) (Badan Pusat Statistik, 2022) didapatkan hasil bahwa angka partisipasi sekolah di daerah tertinggal masih jauh jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Hal tersebut dipengaruhi hal berikut seperti minimnya infrastruktur pendidikan, minimnya tenaga pendidik yang berkualitas, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah yang ada di berbagai daerah, tingginya angka putus sekolah. Hal tersebut lah yang membuat ketimpangan yang berdampak pada rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dikalangan peserta didik di seluruh Indonesia dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengisiasi kembali berdirinya Sekolah Rakyat guna melakukan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Wibowo, 2025). Pada penerapannya, sekolah rakyat yang kali ini akan dijalankan harus diperbaharui agar dapat menjadi jawaban dari tuntutan zaman dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 (Yuningsih, 2019). Pelaksanaannya juga harus inklusif, mengajarkan keterampilan hidup, pendidikan karakter, dan nilai-nilai kebangsaan agar dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu perlunya sinegi antar seluruh *stake holder* agar program ini dapat terlaksana agar mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan melalui pendidikan, masyarakat dapat memperbaiki taraf hidup.

Pemerintah saat ini sangat memperhatikan gagasan mendirikan kembali Sekolah Rakyat. Diharapkan sekolah rakyat kontemporer tidak hanya meniru ide-ide lama, tetapi juga menawarkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman (Wibowo, 2025). Sekolah Rakyat dapat mempercepat pemerataan pendidikan, khususnya di daerah yang selama ini terpinggirkan, dengan mengadopsi prinsip inklusivitas dan kearifan lokal. Namun, membangun Sekolah Rakyat tidak mudah. Terdapat beberapa tantangan pada penerapannya yaitu terbatasnya jumlah guru yang berkualitas yang merupakan masalah utama. Selain itu, letak geografis seperti kesulitan mencapai lokasi terpencil juga dapat menjadi hambatan. Hambatan lain yang harus diantisipasi adalah kurangnya infrastruktur, biaya yang tinggi, dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada persiapan yang cermat dari pemerintah. Tantangan lain yang mungkin dapat ditemui yaitu keberakaman suku yang ada di setiap daerah dan juga keterimaan mereka terhadap suatu program yang dicanangkan pemerintah.

Persepsi masyarakat terhadap program ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya. Di sinilah relevansi Teori Persepsi Sosial dari (Allport, 1954) berperan penting. Allport menjelaskan bahwa persepsi sosial adalah proses penilaian individu terhadap suatu situasi sosial, yang dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, pengalaman, motivasi) dan eksternal (lingkungan sosial, budaya, norma) seperti yang ditampilkan pada gambar 1. Pemerintah harus mampu memastikan kepada seluruh masyarakat bahwa program yang akan dijalankan akan menjawab seluruh ketakutan dan kebutuhan mereka. Pemahaman akan persepsi masyarakat dapat membantu perancang kebijakan menyusun pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual agar Sekolah Rakyat diterima dan berjalan optimal.



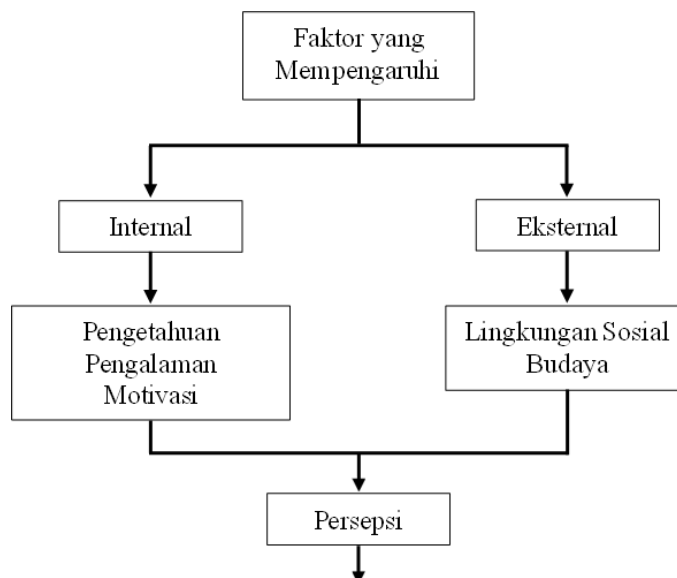
Gambar 1. Contact-prejudice mediation model ((Pettigrew & Tropp, 2008), p. 928).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program sekolah rakyat ini, mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan, dan mengetahui pandangan masyarakat terkait program ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model Miles *and* Huberman (Miles & Huberman, 1994) dimana peneliti bertindak langsung dalam pengambilan data. Data disebarkan melalui *gform* dengan melibatkan 50 orang yang diambil secara acak (*purposive sampling*) dengan memberlakukan sejumlah syarat yaitu: sampel bekerja di dinas pendidikan, menjabat sebagai kepala sekolah, aktif sebagai guru, orang tua murid dan/atau tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara semi terstruktur, dan observasi non partisipatif. Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah triangulasi Teknik menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi (Creswell & Creswell, 2017). Adapun lokasi para partisipan yang terlibat berasal dari daerah Dompu-NTB, Sorong-Papua Barat Daya, Bone-Sulawesi Selatan, Banyumas-Jawa Tengah, Ogan Hilir-Sumatera Selatan.

Pada penelitian, penulis menggunakan teori (Allport, 1954) sebagai indicator pada instrument kuesioner dimana data direpresentasikan seperti flowchart 1 berikut:



Flowchart 1. Persepsi Sosial Allport

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan (Maret-April 2025) dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Sebaran Kuesioner

Aspek Penilaian	Sangat tidak Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Netral (%)	Setuju (%)	Sangat Setuju (%)
Kesiapan Infrastruktur	6	16	24	28	26

Kesiapan Tenaga Pendidik	10	20	30	30	10
Dukungan Masyarakat	2	6	18	50	24
Relevansi Kurikulum Kontekstual	8	10	22	40	20
Kebutuhan Sekolah Rakyat di Daerah	2	4	10	56	28

Melalui pengambilan data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat mendukung adanya pembentukan sekolah rakyat (74%) atau sekitar 37 orang partisipan. Hal ini juga harus disertai dengan pembangunan dan persiapan infrastruktur di daerah. Karena, sebanyak 54% atau sekitar 27 orang dari jumlah partisipan mengatakan bahwa perlu diperhatikan infrastruktur yang ada di daerah untuk mendukung program tersebut. Hal ini dikarenakan banyak sekolah di daerah yang masih minim fasilitas baik berupa gedung, media pembelajaran, listrik, dan jaringan internet (hasil dari wawancara 2 guru di sekolah). Hal senada dengan hasil wawancara guru juga didapat dari orang tua/tokoh masyarakat dimana mereka mengatakan bahwa ketidak adaan infrastruktur yang cukup mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan efektif. Bahkan masih terdapat sekolah di daerah mereka yang hampir rubuh karena dimakan usia dan belum tersentuh revitalisasi.

Sementara itu sebanyak 84% dari total 50 orang partisipan (42 orang) mengatakan bahwa dengan tujuan sekolah rakyat yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui (Wibowo, 2025) maka mereka menyambut baik hal tersebut. Namun, dapat kita lihat terdapat 8 orang atau sekitar 16% partisipan yang mengatakan bahwa sekolah rakyat bersifat tidak memiliki urgensi tinggi untuk dilaksanakan. Salah satu dari kepala sekolah yang diwawancarai mengatakan bahwa dia mengatakan tidak terlalu butuh pembangunan sekolah rakyat karena dia menganggap proyek sekolah rakyat berpotensi terjadi penyelewengan dana seperti program-program pemerintah sebelumnya yang pernah terlaksana.

"saya mendukung adanya sekolah rakyat, tapi untuk saat ini perlu pengawasan ketat dari untuk pelaksanaannya dan saya pikir pemerintah belum siap. Karena hal ini akan berpotensi terjadi celah korupsi pada pelaksanaannya" (Kepala Sekolah x)

Hal tersebut juga didukung oleh salah satu tokoh masyarakat yang berasal dari Dompu. Dia mengatakan bahwa harus dikaji dengan benar untuk pelaksanaan, pertanggungjawaban, program, dan hal lain terkait pelaksanaan sekolah rakyat ini. Beliau mengatakan bahwa alasan dia menjawab tidak setuju terkait pembentukan sekolah rakyat karena akan sarat dengan unsur politik dan berpotensi untuk penerapan secara masif menjadi terkendala. Meskipun terdapat 40% partisipan atau sekitar 20 orang partisipan mengatakan kesiapan tenaga pendidik sudah memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugasnya jika sekolah rakyat diterapkan. Namun, data lain pada tabel didapatkan bahwa 30% (15 partisipan) mengatakan persiapan tenaga pendidik harus dipersiapkan dengan baik. salah satu guru di Sorong mengatakan, mereka memerlukan peningkatan kompetensi berupa pelatihan dan pendampingan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran dan juga adaptasi teknologi.

Pentingnya adaptasi teknologi dan peningkatan kompetensi guru dikarenakan setiap tenaga pendidik harus kompeten di setiap bidang yang akan mereka ajarkan. hal ini dikarenakan masih terdapat guru di daerah 3T yang masih belum mengenal teknologi. Sehingga pemerintah harus memperhatikan hal tersebut. Salah satu tokoh masyarakat di Dompu juga mendukung apa yang dikatakan oleh guru di Sorong. Dimana dikatakan bahwa sebelum benar-benar terlaksana, seluruh guru yang akan terlibat diberikan pelatihan dan juga difasilitasi dengan sekelompok pemahaman terkait lokasi dan budaya dimana mereka akan ditempatkan.

”kebudayaan kami berbeda dengan daerah lain, harapannya guru-guru yang aan mendukung program sekolah rakyat mampu memahami dinamika kelompok masyarakat yang ada di daerah kami” (Tokoh masyarakat Dompu)

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis mengangkat 3 tujuan penelitian yaitu 1. bagaimana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program sekolah rakyat; 2. mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan; dan 3. mengetahui pandangan masyarakat terkait program sekolah rakyat. Pada pembahasan ini penulis akan membahas setiap *Research Question* (RQ) yang ada pada penelitian ini.

RQ 1: Bagaimana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program sekolah rakyat?

Melihat dari hasil yang didapatkan maka yang menjadi konsen pada pengambilan data yaitu kesiapan pemerintah dari segi infrastruktur. Hal ini dikarenakan infrastruktur merupakan salah satu bagian yang saya vital perannya dalam suatu pelaksanaan program. Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk bangunan saja. Namun terdapat beberapa bagian infrastruktur yang harus diperhatikan seperti infrastruktur fisik dan teknologi. Dalam kaitannya dengan infrastruktur fisik, pemerintah harus mempersiapkan listrik, telekomunikasi, bangunan publik dalam hal ini sekolah, dan jalan. Bangunan fisik bukan hanya bicara sekolah, namun terdiri dengan ruang kelas, ketersediaan laboratorium IPA (Hopeman et al., 2024) dan TIK, ketersediaan toilet yang layak, ketersediaan ruang pertemuan, halaman, dan hal lainnya yang berkaitan.

Hal ini karena infrastruktur fisik mendukung keterlaksanaan program sebanyak 60-70%. Jika melihat dari infrastruktur yang ada saat ini, terdapat penurunan jumlah sekolah dengan kondisi baik di Indonesia dibandingkan tahun 2020/2021. Sebanyak 39,39% ruang sekolah dengan keadaan baik dan 60,60% jumlah ruang kelas dengan keterangan rusak ringan/sedang. Hal ini terjadi di hampir tingkat satuan pendidikan. Data didapat per tahun 2021/2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Data selanjutnya yang didapatkan dari (Hakim & Khotimah, 2023)

No	Provinsi	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dki Jakarta	20.710	3.243	431	283	24.667
2	Jawa Barat	64.049	45.432	29.020	11.661	150.979
3	Banten	22.478	9.002	4.851	2.770	40.101
4	Jawa Tengah	59.734	40.313	20.007	10.509	131.413
5	DI Yogyakarta	6.630	3.782	1.417	459	14.291
6	Jawa Timur	60.419	40.291	20.125	11.271	136.119
7	Aceh	11.344	7.448	5.122	2.312	26.228
8	Sumatera Utara	17.247	20.265	11.298	6.827	75.827
9	Sumatera Barat	13.858	9.076	5.804	2.961	31.899
10	Bina	11.715	8.141	1.030	2.885	33.771
11	Kepulauan Riau	6.227	1.706	620	421	9.362
12	Jambi	7.478	5.835	3.840	1.789	18.742
13	Sumatera Selatan	17.435	9.691	7.003	3.146	37.475
14	Bangka Belitung	3.838	1.451	1.050	896	7.235
15	Bengkulu	4.892	3.121	2.029	610	11.158
16	Lampung	15.230	10.476	7.720	3.650	37.185
17	Kalimantan Barat	11.919	8.647	1.204	3.283	30.063
18	Kalimantan Tengah	7.537	5.152	3.442	1.661	17.992
19	Kalimantan Selatan	10.616	4.441	3.730	1.245	21.544
20	Kalimantan Timur	10.435	4.001	1.592	1.145	17.163
21	Kalimantan Utara	2.104	1.111	443	391	3.991
22	Sulawesi Utara	7.035	3.402	2.604	1.546	14.793
23	Gorontalo	3.408	1.299	1.232	479	6.418
24	Sulawesi Tengah	8.028	1.803	1.090	2.280	19.801
25	Sulawesi Selatan	16.098	12.183	10.249	5.103	45.533
26	Sulawesi Barat	2.813	2.012	2.111	1.031	8.811
27	Sulawesi Tenggara	7.215	3.765	3.458	2.197	16.845
28	Maluku	4.914	2.240	3.214	1.488	12.216
29	Maluku Utara	2.637	2.123	2.471	1.190	6.521
30	Nani	10.113	4.267	2.188	1.170	17.448
31	Nusa Tenggara Barat	9.308	6.019	4.090	1.794	22.499
32	Nusa Tenggara Timur	15.049	11.500	8.258	5.313	40.219
33	Papua	6.589	3.304	1.102	1.869	17.962
34	Papua Barat	3.416	2.128	1.157	606	7.319
35	Irian Nngin	2.981	148	77	11	3.197
	Indonesia	522.176	307.668	193.720	97.471	1.121.022

Gambar 2. Jumlah Ruang kelas SD menurut Kondisi Tiap Provinsi 2022/2023.

Melihat data yang disajikan di atas pada gambar 2 semakin memperkuat statement yang diutarakan pada bagian hasil jika infrastruktur di sekolah harus mendapatkan perhatian khusus. Selain itu infrastruktur teknologi harus diperhatikan sebab menjadi hal pendukung dalam pembelajaran. Pemerintah melalui KEMENSOS (Safitri, 2025; Wibowo, 2025) menganggarkan 100 miliar rupiah untuk pembangunan 1 sekolah rakyat dan hal ini tergantung pada masing-masing wilayah. Berdasarkan hal ini, pemerintah sudah siap dan memiliki rencana kerja yang matang untuk pembangunan sekolah rakyat.

RQ 2: mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan

Pada RQ 2, berdasarkan hasil yang didapatkan maka hambatan yang terjadi dilapangan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi terlaksananya sekolah rakyat ini yaitu infrastruktur, kompetensi yang dimiliki guru, dan terbukanya peluang penyelewengan dana (korupsi). Hal ini dapat menjadi hambatan jika pemerintah tidak melakukan perbaikan dan memberikan pelatihan khusus kepada guru di daerah maupun calon guru yang akan ditempatkan di daerah tersebut. Hal yang terjadi jika kedua faktor internal ini tidak diatasi yaitu tidak berjalannya dengan maksimal pelaksanaan sekolah rakyat tersebut. Faktor internal yang paling besar dampaknya yaitu penyelewengan dana. Pemerintah melalui kementerian sosial yang dalam hal ini sebagai pelaksana harus melakukan pengawasan ketat terhadap berjalannya program sekolah rakyat tersebut dan menghindari terjadi korupsi dalam skala kecil-besar (Arti & Rizky, 2023; Wicaksono & Prabowo, 2022).

Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yaitu bagaimana status sosial budaya suatu daerah mempengaruhi keberlangsungan dan keberadaan sekolah rakyat (Nur et al., 2024; Trirezeki et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2018) didapatkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat lokal memainkan peranan penting terhadap terlaksana atau tidaknya suatu program. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh (Lubis, 2018) didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Mari et al., 2024) dimana masyarakat di daerah 3T memiliki perbedaan pola pikir yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di daerah tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu pendekatan yang bersifat humanis agar sekolah rakyat dapat terlaksana di setiap daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajak para ketua atau tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan mendengarkan pendapat dan pandangan mereka terkait program yang akan dilaksanakan. Selain itu perlu keterlibatan aktif antara dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua dalam implementasi sekolah rakyat tersebut.

RQ 3: mengetahui pandangan masyarakat terkait program sekolah rakyat

Hasil yang didapatkan dari beberapa tokoh masyarakat, pendidik, dan kepala sekolah dari beberapa daerah di Indonesia merupakan apresiasi dari perwakilan daerah 3T. melihat dari sudut pandang pendidikan, sekolah rakyat yang akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti (Wibowo, 2025) merupakan jawaban dari ketidak merataan pendidikan dan usaha untuk meratakan fasilitas pendidikan di daerah. Pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan cara membuat suatu system pelaksanaan yang adil di seluruh wilayah Indonesia tanpa membeda-bedakan (Rosmana et al., 2023; Syafii, 2018).

Jika melihat atau mendengar sekolah rakyat, maka yang terlintas pertama sekali di kalangan tokoh pendidikan adalah *volkschool* yang pernah diterapkan di Indonesia. Dimana pada pelaksanaannya, *volkschool* tersebut terjadi diskriminasi sosial. Hal ini terlihat dari siapa saja yang dapat bergabung di sekolah rakyat tersebut (kaum menengah kebawah) dan terjadi perbedaan perlakuan diantara mereka (Ardhillah, 2022; Suherman & Bastaman, 2019). Meskipun respon partisipan pada hasil penelitian sebanyak (74%) atau sekitar 37 orang

partisipasi mengatakan bahwa sekolah rakyat perlu dan bersifat urgen untuk dilaksanakan, namun mereka masih berharap supaya sistem atau pola yang pernah diterapkan di *volkschool* pada zaman colonial tidak sama dengan sekolah rakyat saat ini.

SIMPULAN

Melihat dari RQ 1-3 yang diutarakan pada bagian pendahuluan dan dibahas pada pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan pada penelitian ini yaitu pemerintah harus memperhatikan aspek kearifan lokal, kebudayaan, dan unsur sosial dalam menerapkan sekolah rakyat terkhusus di daerah 3T. hal lain yang dapat disimpulkan yaitu hambatan yang mungkin terjadi ketika penerapan atau pembangunan sekolah rakyat tersebut. Pemerintah harus melakukan kerja sama dengan semua pihak mulai dari tingkat daerah-masyarakat, unsur pendidikan seperti dinas pendidikan, guru, kepala sekolah. Hambatan yang mungkin terjadi yaitu dalam hal perbaikan infrastruktur fisik dan teknologi. Pada hal ini pemerintah harus mampu memberikan pemerataan antara daerah maju dengan daerah 3T supaya tidak terjadi kesenjangan pendidikan. Hal lain terkait sekolah rakyat dari sudut pandang masyarakat yaitu masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui program sekolah rakyat tersebut. Mereka masih menganggap bahwa sekolah rakyat masa kini merupakan sekolah yang sama pada masa colonial (*Volkschool*). Masih terdapat kurang lebih 2 bulan sebelum sekolah rakyat benar-benar diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Artinya pemerintah melalui kementerian sosial harus mampu mempromosikan program tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat di daerah (khususnya daerah 3T).

DAFTAR RUJUKAN

- Al Mahmudi, F., & Bungsu, A. P. (2023). Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama (Kajian Historis Tentang Perjalanan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Lama). *Jurnal Wawasan Sarjana*, 2(3), 166–175.
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Reading/Addison-Wesley.
- Ardhillah, F. (2022). *Sejarah Pendidikan Sekolah Rakyat (Volkschool) Pada Masa Kolonial Belanda Di Aceh*. UIN Ar-Raniry Fakultas Adab dan Humaniora.
- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fadil, K., Amran, A., & Alfaien, N. I. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(2).
- Fathiya Dwi Utami, S., Ridam Nur Aryadi, M., & Fathin Fawwaz Almauqy, M. (2024). TRANSFORMASI DAN PENGARUH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU DI INDONESIA. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 3(1 SE-Articles), 141–150. <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v3i1.2059>

- Hakim, A., & Khotimah, C. (2023). *IKHTISAR DATA PENDIDIKAN TAHUN 2022/2023*.
[https://repositori.kemdikbud.go.id/29026/1/BukuIkhtisar Pendidikan22-23.pdf#page=82.64](https://repositori.kemdikbud.go.id/29026/1/BukuIkhtisar%20Pendidikan22-23.pdf#page=82.64)
- Hopeman, T. A., Arnyana, I. B. P., & Suastra, I. W. (2024). Identifikasi Permasalahan Penyebab Rendahnya Nilai TIMSS dan PISA Indonesia Pada Mata Pelajaran IPA (Studi Kasus di Kecamatan Jampang). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 4.
- Kurnia, H., & Hudaidah, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945–1966). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 839–846.
- Lubis, M. S. A. (2018). Dampak perubahan sosial terhadap pendidikan. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 513–523.
- Mari, R., Atang, A., & Yusuf, N. W. (2024). Studi Dampak Sosial Masyarakat Terpencil dalam Mengakses Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 9(2), 1–9.
- Marwan, I., Gustaman, R. F., & Gandi, A. (2024). Dikotomi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 155–161.
- Mayrinda, R., Maesaroh, S., Hopeman, T. A., & Nurulaeni, F. (2024). The Relationship of Family Problems on The Development of Social and Emotional Attitudes of Primary Students. *International Conference on Education, Humanities, and Social Science (ICEHoS 2023)*, 149–159.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nur, D., Ibraya, N. S., & Marsuki, N. R. (2024). Dampak sosiologi digital terhadap perubahan sosial budaya pada masyarakat masa depan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 123–135.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2008). How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators. *European Journal of Social Psychology*, 38(6), 922–934.
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2023). Upaya pemerataan pendidikan berkelanjutan di daerah 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), 405–418.
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1–15.
- Safitri, E. (2025). *Cak Imin: Anggaran Satu Sekolah Rakyat Rata-rata Rp 100 Miliar*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7816550/cak-imin-anggaran-satu-sekolah-rakyat-rata-rata-rp-100-miliar>
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W. R. (2019). Pendidikan karakter: studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa. *Widya Accarya*, 10(1).
- Suherman, A., & Bastaman, W. W. (2019). Perkembangan Sekolah Rakyat (Volkschool) Di Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten Tahun 1940-1964. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(2).

- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153–171.
- Trirezeki, A., Fitriana, F., & Ubabudin, U. (2025). DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP PENDIDIKAN. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 5(2), 221–228.
- Wibowo, F. G. (2025). *Kemensos Matangkan Konsep Sekolah Rakyat, Siap Diluncurkan Juli 2025*. Kementerian Sosial. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Kemensos-Matangkan-Konsep-Sekolah-Rakyat,-Siap-Diluncurkan-Juli-2025>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016–1028.
- Yuliyanti, Y., Damayanti, E., & Nulhakim, L. (2022). Perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia dan perbedaan dengan kurikulum di beberapa negara. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(3), 95–106.
- Yuningsih, Y. (2019). Pendidikan kecakapan abad ke-21 untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. *Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar*, 6(1), 135–152.